



Sterilisasi Bong Suwung Jalan Terus

■ DPRD DIY Upayakan Solusi

YOGYA, TRIBUN - Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Beny Suharsono menegaskan, Pemkot Yogyakarta hanya berperan sebagai fasilitator dalam permasalahan pengurusan warga Bong Suwung oleh PT KAI. Kewenangan sterilisasi ada di tangan PT KAI sebagai pemilik lahan.

Beny menjelaskan bahwa PT KAI telah memiliki rencana dan telah melakukan sosialisasi kepada warga terdampak. Pemkot Yogyakarta hanya dilibatkan dalam proses tersebut karena lokasi Bong Suwung berada di wilayah Kota Yogyakarta.

Hal tersebut disampaikan Beny saat menerima puluhan warga Bong Suwung yang menggelar unjuk rasa di Kompleks Kepatihan, Kamis (12/9). Dalam aksi tersebut, warga tetap kukuh menolak rencana pengurusan lahan tempat tinggal mereka oleh PT KAI Daop 6 Yogyakarta.

Aksi ini dilakukan menyusul belum adanya kesepakatan antara warga dan pihak KAI terkait solusi atas permasalahan tersebut. "Tan sudah ada rencana dari PT KAI dan disosialisasikan kepada warga terdampak. Muncul negosiasi dan difasilitasi oleh Pemkot Yogya," ungkapnya.

Beny menambahkan, Pemkot dilibatkan dalam proses sterilisasi tersebut karena Bong Suwung berada di kawasan Kota Yogyakarta. Diharapkan ke depan, ada *win-win solution* antara PT KAI dan warga Bong Suwung.

"Tapi tidak boleh ada kekerasan ya, namanya aspirasi kan semuanya harus didengarkan," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, warga menitipkan surat kepada Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X. Surat berisi penolakan rencana pengurusan dan sterilisasi kawasan Bong Suwung. Mereka juga mengirimkan surat kepada Presiden RI, Joko Widodo dan sejumlah instansi.

"Negara harus bertanggung jawab atas kehidupan warga negara, tidak terkecuali warga Bong Suwung," papat penasihat Aliansi Bong Suwung, Chang Wendyanto di sela aksi.

Menurut Chang, masyarakat rakat rakyat miskin per-

- SAMPAIKAN ASPIRASI**
- Puluhan warga Bong Suwung unjuk rasa di Kompleks Kepatihan, Kamis (12/9).
 - Mereka kukuh menolak rencana pengurusan lahan tempat tinggal mereka oleh PT KAI.
 - Sementara itu, PT KAI memastikan sterilisasi warga Bong Suwung akan tetap dilakukan.
 - DPRD DIY membuka forum diskusi untuk memecah permasalahan tersebut.

kotaan yang kehilangan tempat tinggal mestinya tidak boleh diabaikan. Warga Bong Suwung meminta presiden beserta jajaran pemerintah pusat dan daerah memertalihkan PT KAI untuk menghentikan segala proses pelaksanaan sterilisasi.

Mereka juga menuntut adanya penundaan waktu pelaksanaan sterilisasi di kawasan yang merupakan merupakan area ruang milik Jalan (rumija) dan ruang manfaat jalan (rumajal). "Kami minta adanya penundaan sampai tercapainya audiensi dan mediasi sterilisasi," ujarnya.

Chang juga meminta pemerintah turut memperhatikan nasib ratusan warga Bong Suwung yang saat ini juga berjuang mencari nafkah. Ia tidak menampik bahwa terdapat sekitar 75 perempuan pekerja seks komersial (PSK) yang menetap dilahan Bong Suwung.

Sementara total jumlah kepala keluarga (KK) di sana lebih kurang ada 78 KK dan diperkirakan total warga Bong Suwung mencapai sekitar 400 jiwa. "PSK sana bukan kayak di tempat hotel-hotel. Di sana paling Rp50 ribu belum dipotong kamar, dipotong agitu. Di sana ada sekitar 75 (PSK) sekitar itu," jelasnya.

Peringatan
 Tertislah, PT KAI memastikan sterilisasi warga Bong Suwung yang menempati rumija dan rumaja milik PT KAI akan tetap dilakukan. Sebab mediasi yang dilakukan dengan PT KAI Daop 6 Yogyakarta juga dirasa belum membahayakan hasil sesuai yang mereka inginkan.

"Tadi pagi (Kamis), kami sudah ketemu warga Bong Suwung, mediasi di DPRD," ujar Manager Humas PT KAI Daop 6 Yogyakarta, Krisbiyantoro saat dikonfirmasi.

Menurut Kris, meskipun ada penolakan dari

warga, sterilisasi kawasan tersebut tetap dilakukan dengan menertitikan bangunan-bangunan yang masuk di emplasemen stasiun di Bong Suwung. Apalagi PT KAI sudah melayangkan surat peringatan beberapa kali.

Surat Peringatan (SP) 1 untuk mengosongkan bangunan sudah dilayangkan pada 5 September 2024 lalu. Selanjutnya SP 2 dilakukan pada Kamis (12/9) ini. Sedangkan SP 3 akan dikirim pada 19 September 2024 nanti.

Kendati demikian, PT KAI masih membuka ruang komunikasi sebelum tanggal penerbitan sterilisasi stasiun. "Namun sterilisasi tetap kami lakukan, dan direncanakan tanggal 25 atau 26 September 2024 besok," pungkasnya.

Ketua DPRD DIY sementara, Nuryadi menyampaikan telah membuka forum diskusi untuk memecah permasalahan tersebut. Diketahui posisi tanah yang kini ditempati warga Bong Suwung merupakan Sultan Ground (SG).

Pihak Keraton Ngayogyakarta kemudian mengeluarkan Surat Palilah atau surat keputusan pemberian izin penggunaan tanah SG kepada PT KAI. Karena saat itu PT KAI belum memiliki rencana pemanfaatan lahan, tanah tersebut jadi tempat bermukim oleh warga Bong Suwung.

Dari fakta tersebut, DPRD DIY mengupayakan agar warga Bong Suwung bertemu dengan Sekda DIY supaya menemukan jalan keluar. "Saya bersama-sama untuk menyampaikan hasil ini kepada mitra kami tingkat satu (Pemerintah DIY) yang hari ini akan ditemui Sekda. Karena dulu Ngarsa Dalam (Sri Sultan) memberikan palilah, mudah-mudahan bisa mengundang KAI untuk bagaimana baiknya," ungkap Nuryadi. (haa)



GELAR AKSI - Warga Bong Suwung menggelar aksi unjuk rasa menolak pengurusan di Kompleks Kepatihan, Kamis (12/9).

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Oktober 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005